

Pengungsi Terkatung-katung Di Kalideres

RAKYAT MERDEKA - 30/7/18.

Pemerintah Gagal Beri Perlindungan

Kondisi para pengungsi yang terlantar di depan Rumah Detensi Imigrasi Kalideres, Jakarta Barat, kian memprihatinkan.

PRESIDEN Jokowi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun didesak mencari solusi bersama. Pengacara publik LBH Jakarta, Alldo Fellix Januardy mengatakan, para pengungsi terlantar ini berasal dari Afghanistan, Sudan, dan Somalia. Mereka adalah korban persekusi dan konflik dari negara asalnya masing-masing dan mencari perlindungan di Indonesia.

“Mereka terpaksa hidup terlantar di pinggir jalan akibat pemerintah pusat dan daerah

lalai menjalankan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Padahal Peraturan Presiden (Perpres) no. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri telah mengamanatkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah agar wajib menyediakan tempat penampungan yang layak, beserta fasilitas air bersih, pangan, pelayanan kesehatan dan kebersihan, dan fasilitas ibadah.

“Namun, berkaca dari kondisi para pengungsi di Kalideres tersebut, pemerintah telah gagal untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ungkapnya. LBH Jakarta merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi permanen atas krisis pengungsi.

Wacana yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk memberdayakan para pengungsi sebagai tenaga pengajar bahasa asing atau mengikutsertakan mereka dalam program kewirausahaan OK OCE, perlu segera direalisasikan.

Apalagi pada berbagai kesempatan di forum internasional, Presiden Jokowi kerap meng-

gaungkan nama Indonesia sebagai negara yang berkontribusi besar terhadap berbagai persoalan dunia Islam, yang salah satunya adalah krisis pengungsi.

“LBH Jakarta mendesak Presiden Jokowi agar dapat membuktikan retorika tersebut dengan segera memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah konkret melindungi hak pengungsi,” tandas Alldo.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengemukakan ide untuk mengajak para pengungsi di Jakarta yang berasal dari negara konflik Timur Tengah untuk mengajar di

One Kecamatan One Center for Enterpreunership (OK OCE).

Para pengungsi itu selama ini tidak diperbolehkan mendapat pekerjaan lantaran status tinggal mereka di Indonesia hanya sementara. Sandi yakin ada beberapa di antara pengungsi itu yang memiliki kemampuan dalam hal teknik mesin, tata boga, dan sebagainya.

“Banyak juga dari mereka yang punya skill. Mungkin mereka dulunya adalah engineer, maupun juga guru, nah ini ternyata mereka tertarik. Walau mereka tidak boleh berkerja di sini, tapi mereka bisa menjadi instruktur pendamping di OK OCE,” kata Sandi. ■ OSP